

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Implementasi

Implementasi adalah sebuah proses yang diterapkan tanpa ada batasan di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kemasyarakatan, politik, teknologi, kesehatan, informasi dan lain-lain. Implementasi Pendidikan artinya segala sesuatu yang dilaksanakan, diterapkan sesuai dengan program yang dirancang untuk dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam dunia pendidikan. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi merupakan kegiatan untuk mendistribusikan sebuah kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.⁹

Salah satu cara mewujudkan kebijakan yaitu dengan implementasi. Karena tanpa adanya implementasi sebuah konsep tidak akan dapat terwujud. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah-masalah

⁹ <https://asrulywulandari.wordpress.com>

konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan.¹⁰ Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.¹¹

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.¹²

Garis besar istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerepapan. Dan istilah implementasi sering dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.¹³ Salah satu usaha untuk mewujudkan suatu sistem adalah dengan implementasi, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan dapat terwujud.

Webster merumuskan bahwa mengimplementasikan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan

¹⁰ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta, Kencana Predana Media Group, 2010) hlm. 182

¹¹ Auhad Jauhari, *Pendidikan Inklusif Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas*, Jurnal Ijtimaya_vol.1no.1 Juli – Desember 2017 hal. 29

¹² <https://asrulywulandari.wordpress.com>

¹³ [https://repository.uin-suska.ac.id/6411/4/BAB III.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/6411/4/BAB%20III.pdf)

sesuatu harus disertai sarana pendukung yang nantinya dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.¹⁴

Ripley dan Franklin menyatakan bahwa implementasi adalah sesuatu yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Sedangkan menurut Grindle memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Implementasi selalau dikaitkan dengan suatu kebijakan. Seorang implementor harus mampu menerapkan kebijakan yang sudah tersusun dan terencana dalam suatu sistem atau kegiatan. Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia mengadopsi konferensi pendidikan di tahun 1990 yang menyatakan pendidikan untuk semua yang kemudian dikonversi menjadi pendidikan inklusif pada tahun 1994. Landasan dari pendidikan inklusi seperti halnya pendidikan pada umumnya yang tertuang dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003, dan juga undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 tentang sistem pendidikan nasional.

Dari berbagai definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai pelaksana kebijakan

14 Ibid

dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pendidikan Inklusif

1. Pengertian Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar di ruang yang sama. Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak sebayanya disekolah regular terdekat dengan tempat tinggalnya.¹⁵ Dalam peraturan Menteri pendidikan nasional Republik Indonesia nomor 70 tahun 2009 dijelaskan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menyertakan semua anak secara bersama-sama dalam suatu iklim dan proses pembelajaran dengan layanan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa membedakan anak yang berasal dari latar suku, kondisi sosial, kemampuan ekonomi, politik, keluarga, bahasa, geografis tempat tinggal, jenis kelamin, agama, dan

¹⁵ Khoirul Umam Alfaaroqi, Implementasi Pendidikan Inklusif dan Kendalanya di SDN Betet 1 Kota Kendari, Jurnal Ilmiah Psikologi, Februari 2020, Vol.22 No.1

perbedaan kondisi fisik atau mental. Sementara itu Sapon-Shevin menyatakan bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah terdekat.¹⁶ Melalui pendidikan inklusif anak-anak dengan kebutuhan khusus di didik bersama dengan anak normal untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Konsep pendidikan inklusi merupakan konsep yang menyajikan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga negara. Sebagaimana tujuan dari pendidikan inklusif seperti yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2009 bertujuan (1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan social atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.¹⁷

Menurut Sapon-Sevin pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sistem layanan pendidikan luar biasa yang mempersyaratkan agar semua anak luar biasa mendapat pelayanan yang sama di sekolah-sekolah yang terdekat. Pendidikan inklusif

¹⁶ Asep Supena Jayadi, Implementasi Pendidikan Inklusi di SDN K1 Kabupaten Karawang, Jurnal Pendidikan non Formal, Januari 2023, vol.9 no.1 UNJ Jakarta

¹⁷ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009, Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

menekankan adanya restrukturisasi di sekolah sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, artinya kaya dalam sumber dan dukungan dari semua guru dan siswa.

Stainback dalam Sunardi mengatakan bahwa sekolah yang inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah harus mampu menyediakan program pendidikan yang layak, namun sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa dengan dukungan dan bantuan yang diberikan oleh para guru sehingga anak-anak berhasil dalam pembelajaran. Sekolah inklusif merupakan tempat bagi semua anak dapat diterima menjadi bagian dari lingkungan kelas tersebut dan saling membantu, baik dengan guru maupun teman. Menurut Vaught, Bos dan Schumn dalam Sunardi, dalam praktiknya istilah inklusif sama halnya dengan istilah mainstreaming dalam pendidikan, yang dapat diartikan sebagai penyediaan layanan pendidikan yang layak bagi anak berkebutuhan khusus dalam mendapatkan hak pendidikannya.

Penerapan layanan siswa berkebutuhan khusus disediakan berbagai alternative sesuai dengan kemampuan dan dasar pemikiran para pakar yang bersifat logis dan sistematis, berfungsi sebagai acuan utama dalam melakukan penelitian. Kajian teori juga digunakan sebagai penguat pemaparan landasan teori penelitian dari objek yang diteliti sehingga hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber ilmu. Siswa dengan

kebutuhan khusus dapat berpindah dari satu bentuk layanan ke bentuk layanan yang lain.¹⁸ Seperti:

1) Bentuk kelas regular penuh

Siswa berkebutuhan khusus belajar bersama siswa lain sepanjang hari di kelas regular dengan menggunakan kurikulum yang sama.

2) Bentuk kelas regular dengan cluster

Siswa berkebutuhan khusus belajar bersama siswa lain di kelas regular dalam kelompok khusus.

3) Bentuk kelas regular dengan pull out

Siswa berkebutuhan khusus belajar bersama siswa lain di kelas regular namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas regular ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pendamping khusus.

4) Bentuk kelas regular dengan cluster dan pull out

Siswa berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain di kelas regular dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas regular ke ruang sumber untuk belajar bersama dengan guru pendamping khusus.

5) Bentuk kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian regular

Dalam bidang-bidang tertentu anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan anak lainnya di kelas regular. Namun siswa berkebutuhan khusus

¹⁸ <http://repository.uin-suska.ac.id/2790/3/BAB2011.pdf>

belajar dikelas khusus pada sekolah. Sehingga anak berkebutuhan khusus hanya dapat mengikuti pembelajaran pada bidang tertentu saja dan terpisah dengan anak regular dan ditempatkan di sekolah khusus pada saat bidang pembelajaran lainnya.

6) Bentuk kelas khusus penuh di sekolah regular

Siswa berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah regular. Sehingga terpisah dengan anak regular namun masih dalam satu sekolah yang sama dengan anak regular.

2. Tujuan pendidikan inklusif

Menurut Dedy Kustawan tujuan pendidikan inklusif meliputi (1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

3. Fungsi Pendidikan Inklusif

Zaenal Alimin menjelaskan bahwa sesuai disiplin ilmu fungsi pendidikan inklusif dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Fungsi Preventif

Melalui pendidikan inklusif guru melakukan upaya pencegahan agar tidak muncul hambatan-hambatan yang lainnya pada anak berkebutuhan khusus. Sehingga anak berkebutuhan khusus dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan.

2. Fungsi intervensi

Pendidikan inklusif menangani anak berkebutuhan khusus agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Sehingga anak yang berkebutuhan khusus dapat meraih prestasi atau kemampuan yang sesuai dengan kemampuannya.

3. Fungsi kompensasi

Pendidikan inklusif membantu anak berkebutuhan khusus untuk menangani kekurangan yang ada pada dirinya dengan menggantikan dengan fungsi lainnya.

Berkaitan dengan penelitian pendidikan inklusif yang penulis laksanakan di MTs Ma'arif NU Gombang maka ada dua teori yang dipakai, yaitu:

a. Teori Implementasi

Daniel A. Mazmanian dan Paul A Sabatier menjelaskan makna implementasi yaitu pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang tertuang dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Kesulitan dalam proses implementasi kebijakan dapat terlihat dari pernyataan seorang ahli studi kebijakan Eugne Bardach yang menyatakan bahwa adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas namun sulit dalam melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang. Hal ini sering terjadi dikarenakan pada kenyataanya perencanaan yang

tidak melihat dengan kondisi yang ada sehingga sering tidak sesuai dengan perencanaan tersebut.

b. Teori Pendidikan Inklusif

Indianto menjelaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk belajar bersama-sama disekolah umum dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual, sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal.

Budiyanto menjelaskan bahwa pendidikan inklusif adalah model pendidikan yang mengikut sertakan anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak umum di sekolah reguler, dan pada akhirnya mereka menjadi bagian dari sekolah tersebut dan menciptakan suasana belajar yang kondusif.

Menurut O'Neil pendidikan inklusif juga dapat diartikan sebagai sistem layanan pendidikan luar biasa yang mempersyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah terdekat dan bersama-sama dengan anak-anak umum.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah hasil kajian dari laporan hasil-hasil terdahulu yang sesuai dengan masalah ataupun tema pokok yang diajukan peneliti. Relevan artinya buku teks yang digunakan ada dengan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada dan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan dan beberapa yang sesuai dengan tema dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dari Menik Sulistyaningsih dari FTIK IAIN Purwokerto yang berjudul Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SD Negeri Tanjung Purwokerto. Secara ringkas menjelaskan bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto. Dari penelitian tersebut menemukan apa yang menjadi kendala dan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto. Hasil dari penelitian tersebut menemukan upaya sekolah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi evaluasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, subyek penelitian ini adalah kepala sekolah dan empat guru inklusif. Objek penelitian ini adalah evaluasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Persamaan dalam peneliti ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah metode penelitian yang sama. Perbedaan terletak pada fokus penelitian, jika penelitian ini berfokus pada evaluasi maka peneliti yang penulis teliti kepada sistem pembelajaran inklusif pada suatu mata pelajaran.
2. Penelitian relevan berikutnya penelitian dari Nur Ratna Juwita yang berjudul Studi Pelaksanaan Program Inklusif di SMA Negeri 8 Surakarta Tahun Pelajaran 2009/2010. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui upaya apa

saja yang telah dilakukan sekolah dalam mengenalkan program inklusif di SMA Negeri 8 Surakarta. Serta mengetahui implementasi program pendidikan inklusif dalam kegiatan sekolah SMA N 8 Surakarta. Dan mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan program inklusif. Kemudian mengetahui hasil yang telah dicapai dari program rintisan inklusif. Hasil dari penelitian tersebut adalah upaya sekolah dalam mensosialisasikan pendidikan inklusif sebagai pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus. Adanya penerimaan anak didik melalui media online berdampak pada penemuan anak dengan hambatan pembelajaran. Kendala dari penerapan pendidikan inklusif di sekolah dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung program inklusif ditambah dengan stigma masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Persamaan dari penelitian ini pada objek penelitiannya yaitu meneliti anak berkebutuhan khusus dengan permasalahan hambatan dalam pembelajaran (slow learner). Perbedaan dari penelitian ini terletak pada subjek penelitiannya dimana penelitian ini meneliti sekolah sedangkan penelitian yang penulis sampaikan terhadap sebuah mata pelajaran.

3. Penelitian oleh Fuad Nur Ahmadi yang berjudul Implementasi Pendidikan Inklusif Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam bagi Siswa Slow Learner di SD Muhammadiyah 2 Kota Magelang. Penelitian ini membahas tentang konsep inklusif pada pembelajaran PAI bagi siswa slow learner di SD Muhammadiyah 2 Kota Magelang. Dan bagaimana metode pendidikan

inklusif pada mata pelajaran PAI bagi siswa slow learner di SD Muhammadiyah 2 Kota Magelang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, sebagai subjek kepala sekolah, dan wakil kurikulum. Hasil dari penelitian tersebut adalah perhatian sekolah terhadap anak berkebutuhan khusus dengan diberikan jam tambahan dan juga guru pendamping dalam proses pembelajaran. Namun juga ada faktor penghambat yang peneliti temukan yaitu kurangnya perhatian dari orang tua sedangkan faktor pendukungnya adalah adanya pembekalan terhadap guru dalam penerapan pendidikan inklusif. Persamaan penelitian ini yaitu pada objek penelitian dimana meneliti keadaan pembelajaran terhadap satu mata pelajaran. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada subjek dimana pada penelitian tersebut hanya pada anak slow learner sedangkan penelitian ini baik pada anak slow learner maupun ADHD.

4. Penelitian oleh Nurul Hidayati Rofiah dengan judul Penerapan Metode Pembelajaran Siswa Slow Learner di SD Inklusif Wirosaban Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan penerapan metode pembelajaran untuk peserta didik slow learner di SD Negeri Wirosaban. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya penerapan metode pembelajaran untuk anak slow learner di SD Negeri Wirosaban dengan metode ceramah, Tanya jawab dan diskusi dengan demonstrasi sehingga memberikan pemahaman yang mudah bagi anak slow learner. Persamaan pada penelitian ini dengan

penelitian tersebut adalah objek penelitian yang merupakan anak slow learner, perbedaan penelitiannya terletak pada metode dalam pembelajarannya.

5. Jurnal dengan judul Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri Pencarikan Kebumen yang ditulis oleh Khulasoh Himawati, Fikria Najitama, dan Maryanto. Dari penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pendidikan Inklusif di SD Negeri Pecarikan Kebumen. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pendidikan Inklusif di SD Negeri Pecarikan Kebumen menggunakan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti susun adalah perihal implementasi pendidikan inklusif yang melalui beberapa tahap. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis terletak pada tahapan implementasi, dimana pada penelitian ini tidak ada tahap pengorganisasian.

C. Kerangka Berpikir

Pendidikan inklusif sudah banyak diterapkan di beberapa sekolah di Indonesia, pendidikan inklusif merupakan sesuatu yang baru di dunia pendidikan Indonesia. Istilah inklusif mengemuka ketika konferensi pendidikan pada tahun 1990 dan mulai diteruskan pada konferensi Salamanca pada tahun 1994.

“Pendidikan khusus merupakan pendidikan yang diperuntukan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena memiliki kelainan fisik, emosional, mental, social, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Oleh karena itu, untuk mendorong kemampuan pembelajaran mereka dibutuhkan lingkungan belajar yang kondusif, baik tempat

belajar, metode sistem penilaian, sarana dan prasarana serta yang tidak kalah pentingnya adalah tersediannya media pendidikan yang memadai sesuai dengan kebutuhan peserta didik.”

Gambar
Kerangka teori